

SEKULARISASI DAN “IDEOLOGI” KAUM SANTRI

Oleh Abdul Munir Mul Khan

Tulisan ini tidak dibuat untuk membicarakan isi apalagi mencari landasan teoretis pembenaran atau penolakan pemikiran Islam yang lahir selama kurun waktu pemerintah Orde Baru. Uraian sepanjang tulisan ini merupakan suatu penjelajahan teoretis yang tentatif mengenai *setting* sosial pemikiran Islam pada masa Orde Baru tersebut.

Penjelasan di atas mengandaikan suatu kerangka teoretis bahwa sebuah pemikiran (Islam) adalah produk sejarah yang di dalamnya berbagai masalah sosial, politik, ekonomi dan juga kebudayaan ikut memainkan peranan. Seluruhnya atau sebagian daripada aspek membentuk suatu situasi duniawi yang di dalamnya “sang pemikir” hidup dan berada. Sementara itu keyakinan iman seorang pemikir Muslim membentuk situasi lain yang bersifat transendental. Sintesis-dialektik kedua situasi tersebut mempengaruhi bentuk pemikiran Islam.

Pemikiran Islam dan perbedaan-perbedaan di dalamnya perlu dijelaskan dalam kerangka sintesis-dialektik tersebut di atas. Dengan demikian pemikiran Islam adalah suatu produk sejarah yang bersifat objektif.

Berdasarkan pengandaian teoretis di atas, pemikiran Islam akan berubah dan berkembang sejalan dengan situasi duniawi “sang pemikir” dalam suatu mekanisme sintesis-dialektik dengan situasi transendentalnya. Hanya mereka yang memiliki kesadaran situasi

dualistik tersebut yang memiliki peluang melahirkan pemikiran mengenai Islam. Secara sosial kelompok ini dikenal sebagai elit yang dalam tiga dasa warsa terakhir diperankan oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan modern.

Apa yang dapat kita amati kemudian adalah produk-produk historis pemikiran Islam yang dapat dihubungkan dengan cara beradanya elit agama tersebut. Melalui proses pemikiran tersebut, Islam sebagai agama wahyu kemudian memasuki dunia antropologis dan sosiologis. Agama dalam konteks pemikiran Islam adalah agama sebagaimana dipahami, dipikirkan dan dijalani oleh elit pemeluknya.

Rasionalisasi dalam Pemikiran Islam

Sejalan dengan perkembangan situasi duniawi tersebut di atas, pemikiran Islam kontemporer— untuk mengidentifikasi kecenderungan pemikiran Islam pada masa Orde Baru—memasuki proses rasionalisasi.

Pemikiran rasional dan ilmiah dalam proses perkembangan kehidupan manusia mulai memasuki bidang-bidang kehidupan praktis. Pemikiran demikian pada abad ke-19 menunjukkan kecenderungan positivistic (Johnson, 1986; 1987) yang dapat dihubungkan dengan gerakan modernisasi melalui konsep pembangunan berdasar perencanaan. Kita kemudian menyaksikan berbagai percepatan perubahan kehidupan sosial di berbagai belahan dunia yang sering kali di luar kontrol rancangan yang ditetapkan sebelumnya.

Perubahan kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia menunjukkan kecenderungan semakin longgarnya hubungan struktural sistem ajaran agama dengan sistem kehidupan sosial. Secara lebih jelas perubahan demikian mempengaruhi tatanan religio-politik suatu sistem kehidupan sosial (Smith, 1985). Demikian pula halnya dengan komunitas Muslim di Indonesia

terutama sejak modernisasi Orde Baru yang dijalankan melalui Pembangunan Nasional (Amir Machmud, 1986; Moertopo, 1981; Mulkhan, 1992).

Dalam proses perubahan religio-politik atau politik-agama komunitas Muslim di Indonesia, muncul berbagai gagasan baru pemikiran Islam yang berciri fungsional dan “sekularistik”. Hal ini menunjukkan rasionalisasi dua arah yaitu: rasionalisasi sistem ajaran Islam dan rasionalisasi situasi sosial lapisan elit Muslim.

Kecenderungan di atas merupakan kecenderungan sejarah dalam suatu masyarakat yang mengalami proses transformasi sosial (Soemardjan dalam Koentowijoyo, 1991). Dalam keadaan demikian berbagai persoalan kehidupan sosial cenderung dipecahkan secara rasional menurut prinsip logika ilmiah. Masalah untung-rugi dalam dimensi waktu yang relatif pendek menjadi batasan yang jelas benar-salahnya pemecahan masalah sosial tersebut. Nilai-nilai agama pada masa ini mengalami suatu reduksi ilmiah dan reduksi rasional.

Secara politik pemikiran Islam pada masa Orde Baru cenderung akomodatif terhadap politik pemerintah. Namun demikian, kecenderungan yang unik dari pemikiran Islam ini menampakkan usaha serius ke arah fungsionalisasi sistem ajaran Islam di tengah kehidupan masyarakat yang semakin modern. Gerakan Islam di masa mendatang agaknya akan merupakan pelembagaan berbagai gagasan dan kecenderungan pemikiran Islam kontemporer tersebut.

Beberapa Problem Teoretis

Berdasarkan kajian di atas dapat dikemukakan beberapa masalah teoretis berikut:

- (1) Perubahan konsep negara-agama dan lunturnya fanatisme elit Muslim tampaknya dapat dihubungkan dengan semakin

kuatnya negara nasional Indonesia dan semakin kuatnya posisi elit Muslim dalam berbagai lembaga “sekular”. Suatu kecenderungan baru yang menguntungkan walaupun semula kurang diharapkan merupakan dampak modernisasi melalui Pembangunan Nasional.

- (2) Hubungan kepentingan dan hubungan ekonomi cenderung lebih berperan menumbuhkan kesetiaan politik daripada solidaritas keagamaan dalam masyarakat modern yang rasionalistis. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap perkembangan gerakan Islam dalam sistem negara-nasional.
- (3) Kecenderungan pemikiran Islam kontemporer yang berciri rasional, urban dan elitis pada akhirnya akan mempengaruhi pola hubungan elit dan massa Muslim yang umumnya hidup di pedesaan dan kawasan pinggiran.

Berdasarkan beberapa problem teoretis di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan hipotesis sebagaimana di bawah ini. (a) Rasionalisasi pemikiran Islam dipengaruhi oleh perubahan fungsi lembaga keagamaan tradisional dalam sistem negara-nasional modern sebagai proses modernisasi. (b) Perubahan fungsi lembaga keagamaan tradisional tersebut kemudian mempengaruhi pola hubungan keagamaan ke arah pola hubungan fungsional. (c) Perkembangan gerakan Islam dalam masyarakat modern akan dipengaruhi oleh fungsi pragmatik gerakan Islam terhadap kehidupan masyarakat pendukungnya.

Posisi Elit dalam Pemikiran Islam

Pudarnya fungsi lembaga keagamaan tradisional dalam kehidupan modern merupakan penjabar perubahan posisi, sosial, ekonomi dan politik elit Muslim yang dibangun di atas kekuasaan dan legitimasi keagamaannya (Jackson, 1990).

Pemikiran Islam kontemporer tampaknya merupakan upaya elit Muslim memperoleh legitimasi agama atas posisi sosial, politik dan ekonominya dalam lembaga sekular. Oleh karena itu, pemikiran Islam kontemporer merupakan sintesis-dialektik sistem ajaran Islam dan kepentingan elit Muslim dalam sistem negara-nasional yang semakin kuat dan modern (Mulkhan, 1992).

Pada satu sisi perubahan pemikiran Islam harus dijelaskan dengan berbagai kebijaksanaan politik pemerintah yang berkuasa. Sementara pada sisi lain dapat dijelaskan oleh posisi sosial, politik dan ekonomi elit Muslim dalam sistem negara-nasional tersebut.

Sejak Pemerintah Orde Baru, secara konseptual dikembangkan modernisasi kehidupan sosial dan politik melalui Pembangunan Nasional. Modernisasi pendidikan Islam yang mulai diletakkan dasar-dasarnya pada awal abad ke-20, pada masa ini menjelaskan berbagai perubahan kehidupan keagamaan Muslim.

Modernisasi pendidikan Islam, merupakan bagian penting modernisasi sosial, ekonomi dan politik Orde Baru yang berpengaruh terhadap perubahan pemikiran Islam (Mulkhan, 1992). Pengaruh itu dapat dilihat terutama oleh munculnya elit modern Muslim yang memasuki berbagai lembaga modern dan mulai menggeser posisi elit Muslim tradisional (ulama) (Usman, 1988). Keberhasilan Orde Baru mencapai tujuan-tujuan politiknya terutama dalam hubungannya dengan komunitas Muslim, tidak saja dijamin oleh semakin kuatnya partai pemerintah, akan tetapi juga ditentukan oleh perubahan perilaku elit Muslim itu sendiri.

Semakin kuatnya fungsi organisasi dan lembaga sekular mengatur tata hubungan sosial ekonomi dan politik warga negara, telah memaksa lunturnya fanatisme sentimen keagamaan elit Muslim. Sintesa dari tuntunan lembaga modern dan sistem ajaran Islam berlangsung secara dialektik dalam bentuk pemikiran kontemporer dan perumusan pola kelakuan elit Muslim.

Pemikiran Islam kontemporer cenderung sebagai harmonisasi—akomodatif berbagai tuntutan lembaga sekular dan sistem ajaran Islam dalam formulasi teologis sebagai legitimasi posisi baru elit

Muslim dalam lembaga sekular tersebut. Dimensi transendental dan objektivitas duniawi saling mengambil peranan, sehingga melahirkan suatu bentuk pemikiran yang unik. Namun demikian, perbedaan situasi sosial dan pengalaman keagamaan masing-masing elit Muslim menyebabkan perbedaan bentuk formulasi secara polaritatif.

Modernisasi pendidikan Islam sebagaimana telah disebutkan melahirkan elit baru Muslim yang relatif berpendidikan tinggi. Selanjutnya penguasaan elit baru Muslim terhadap berbagai permasalahan agama dan sosial menyebabkan lapisan ini memperoleh tidak saja kekuasaan keagamaan akan tetapi juga hak-hak sosial dan politik yang mengakibatkan tergesernya posisi sosial ulama (Usman, 1988).

Posisi elit modern Muslim di atas dipertahankan dan dipelihara dalam berbagai bentuk komunikasi keagamaan dan lembaga keagamaan (Smith, 1985). Oleh karena itu, ketika lembaga dan komunikasi keagamaan mulai kehilangan fungsi sosial dan politik sebagai akibat semakin kuatnya lembaga-lembaga “sekular”, mulai berkembang penafsiran kembali kaidah-kaidah ajaran agama sebagai cara elit Muslim memperoleh legitimasi keagamaan atas posisinya dalam lembaga tersebut. Di sinilah perubahan konsep negara-agama dapat dijelaskan.

Ideologi Baru Elit Muslim

Pada sisi lain, ikatan tradisional elit Muslim terhadap sistem ajaran Islam dan keterikatan fungsionalnya terhadap lembaga sekular merupakan spirit baru yang menggerakkan perubahan radikal tatanan sosial lembaga keagamaan tradisional (Smith, 1985) ke arah yang lebih sintetik dan komplementatif (Ali dan Bachtiar Effendy, 1986). Namun demikian, kecenderungan sosial, elitis dan urban pemikiran Islam serta ketiadaan media komunikasi yang memadai sosialisasi pemikiran Islam kontemporer akan mempengaruhi

hubungan elit massa Muslim ke arah hubungan yang semakin fungsional dan profan. Pemikiran Islam kontemporer tampaknya tidak secara proporsional tercermin dalam kehidupan massa umat di pedesaan, dan kawasan pinggiran.

Selanjutnya, semakin lemahnya lembaga keagamaan tradisional dan sebaliknya semakin kuatnya lembaga sekular bersamaan dengan segmentasi faksionistik pemeluk Islam, ideologi kesatuan umat dan negara berdasar Islam mulai ditinggalkan. Pada masa inilah mulai muncul berbagai gagasan pemikiran Islam sebagai proses perumusan “ideologi Islam” kontemporer yang berwawasan nasional-kebangsaan.

Perumusan “ideologi Islam” kontemporer tersebut di atas merupakan proses sintesa-dialektik pemenuhan ide-ide keagamaan, realitas objektif kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam sistem politik negara-nasional (Koentowidjoyo, 1984; Mulkhan, 1992). Ideologi baru elit Muslim yang diperankan secara representatif oleh berbagai gerakan Islam modern bersifat rasional dan objektif oleh karena itu cenderung pragmatis dalam arti dinamis dan kreatif menghadapi berbagai perubahan sosial yang semakin cepat.

Fundamentalisme Alternatif

Modernisasi, dalam praktik menuntut profanisasi dan sekularisasi berbagai lembaga sosial dan politik termasuk di dalamnya lembaga-lembaga keagamaan (Smith, 1985). Masalah ini merupakan masalah penyumbang perbedaan pemikiran Islam kontemporer terhadap pemikiran sebelumnya (Kartodirdjo, 1984; Benda, 1980; Noer, 1982; 1987).

Secara umum, modernisasi di Indonesia tampaknya berhubungan dengan lahirnya gerakan nasionalisasi dalam bentuk sintesis-dialektik sistem ajaran Islam dengan tuntunan kehidupan modern. Oleh karena itu, tingkat kesertaan elit Muslim terhadap lembaga modern yang sekular akan menunjukkan tingkat kesertaan

terhadap proses sintesa-dialektik tersebut. Demikian pula semakin luas wilayah pengaruh modernisasi dan tingkat keterikatan hubungan organisasi elit Muslim dengan lembaga modern-sekular menunjukkan tingkat kesertaan seorang atau sekelompok elit terhadap pemikiran Islam kontemporer.

Dalam hubungan demikian itu dapat dijelaskan polarisasi pemikiran Islam kontemporer yang secara garis besar terbagi ke dalam 3 kelompok. *Pertama*; radikal, *kedua*; neomodernis dan *ketiga*; neofundamentalis.

Kecenderungan pemikiran radikal merupakan kelompok yang berusaha membongkar konsep tradisional untuk digantikan oleh konsep yang akomodatif terhadap realitas objektif dalam suatu ide Islam-kebangsaan. Sementara neomodernis berusaha merumuskan kembali nilai-nilai tradisional dalam formulasi realistik-idealistik. Selanjutnya neofundamentalis merupakan kelompok yang berusaha merumuskan nilai-nilai tradisional mengenai ide kesatuan umat secara rasional.

Dalam hubungannya dengan dunia politik, pemikiran Islam setidaknya melahirkan 3 (tiga) gagasan. *Pertama*; gagasan yang berusaha meletakkan masalah politik di luar sistem keberagamaan. *Kedua*; gagasan yang berusaha mengundurkan diri dari dunia politik dengan pembentukan *kanthong-kanthong* komunitas Muslim yang eksklusif. *Ketiga*; gagasan yang berusaha meletakkan berbagai aktivitas politik sebagai subsistem gerakan dakwah, sehingga memberi rasa aman dari berbagai sanksi keagamaan dan politik sekaligus dalam sistem negara-nasional. Rekeyasa kultural dalam gerakan Islam modern di atas menempatkan gerakan dakwah sebagai paradigma atau sistem-umum perjuangan Islam.

Melalui pendekatan dakwah seluruh kelompok Islam dalam berbagai asosiasi sosial dan politik ditempatkan dalam sebuah sistem keberagamaan yang terbuka. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan revitalisasi “ideologi” kesatuan umat dalam sistem negara-nasional.

Penutup

Kecenderungan pemikiran Islam kontemporer setidaknya-tidaknya mengakibatkan fundamentalisme sebagai alternatif pemikiran radikal yang dianggap menyimpang dari premis Islam dan pemikiran neomodernis yang dianggap tidak jelas. Sifat eksklusif pemikiran neofundamentalisme yang secara politik dapat menyumbang radikalisme gerakan politik dan sosial akan semakin sulit memperoleh dukungan.

Fundamentalisme merupakan suatu mekanisme unik yang selalu dapat muncul kembali di tengah-tengah kecenderungan umum pemikiran Islam. Keduanya merupakan petunjuk kreativitas dinamis yang akan memperkaya pemikiran Islam di setiap fase sejarah.

Di samping itu, keterikatan elit Muslim terhadap berbagai lembaga sekular menyebabkan gerakan Islam kontemporer akan menghadapi persoalan profanisasi pola hubungan sosial komunitas Muslim. Persoalan ini akan dapat mempengaruhi perubahan fungsi dan bahkan keberlakuan lembaga keagamaan yang relatif modern seperti lembaga pendidikan Islam.

Dalam situasi demikian, keragu-raguan terhadap peranan pengetahuan ilmiah dan logika yang mendasarinya dalam pengembangan pemikiran dan gerakan Islam perlu segera diselesaikan. Penyelesaian itu antara lain dapat ditempuh dengan menempatkan ilmu pengetahuan (termasuk kebudayaan) sebagai proses kreatif umat manusia mencari dan merumuskan kebenaran.

Verifikasi ilmu pengetahuan hanya dapat dilakukan jika premis mayor wahyu dapat dikembangkan sebagai premis minor yang bersifat teoretis nondoktrinal. Penghadapan penemuan ilmiah yang induktif dengan premis mayor secara langsung akan menghasilkan kesalahpahaman terhadap ilmu yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.

Melalui pendekatan metodik di atas, seluruh khazanah pemikiran rasional umat manusia dapat ditempatkan sebagai data empiris.

Oleh karena itu lembaga keilmuan Islam perlu dikembangkan antara lain dengan sikap penuh percaya diri memahami seluruh khazanah pemikiran umat manusia di atas yang tercermin dalam filsafat-filsafat. Masa depan lembaga keilmuan Islam dan juga gerakan Islam akan banyak ditentukan oleh sikap dunia Islam terhadap ilmu pengetahuan rasional tersebut. ❖